

## Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory disclosure* Konvergensi *IFRS*

Hayyu Atika Sari

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas

\*Corresponding Author, hayyuatikasari27@gmail.com

**Abstract :** *This study aims to determine the influence of corporate governance on compliance level of Mandatory disclosure IFRS Convergence. Data obtained from the Indonesia Stock Exchange (IDX) through the website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) in the form of annual reports presented in manufacturing companies in 2020-2021. Pursuant to purposive sampling criterion 150 company used as sample in this research. Hypothesis test in this research using multiple linear regression method. The results showed that the number of members of the board of commissioners has no effect on the compliance level mandatory disclosure IFRS convergence is indicated by the value of regression coefficient of 0.002 with significance of  $0.615 > \alpha 0.05$ . Ownership of dispersion has an effect on compliance mandatory disclosure level of IFRS convergence shown by regression coefficient value equal to 0,043 with significance equal to  $0,044 < \alpha 0,05$ . The number of board meetings has no effect on mandatory disclosure level of IFRS convergence indicated by regression coefficient value of 0.002 with significance of  $0,558 > \alpha 0,05$ . The number of audit committees has an influence on compliance mandatory disclosure level IFRS convergence is indicated by regression coefficient value of 0.033 with significance of  $0.002 < \alpha 0.05$ .*

**Keywords :** *Disclosure, Corporate Governance, IFRS.*



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2022 by author.

### PENDAHULUAN

Laporan keuangan bukan merupakan suatu tujuan akhir tetapi laporan keuangan dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang berguna dalam pembuatan dan pengambilan

keputusan perusahaan dan ekonomi. Laporan Keuangan menggambarkan informasi tentang bagaimana kondisi kinerja perusahaan pada periode tertentu (Putra & Rahayu, 2020). Pengungkapan laporan keuangan merupakan sumber informasi untuk pengambilan keputusan investasi (Aprayuda et al., 2021; Sofyan et al, 2020), dan hal ini juga merupakan minat untuk membuat investor untuk mengambil keputusan (Aprayuda & Misra, 2019). Bagi para investor, informasi yang disampaikan oleh manajemen perusahaan dijadikan sebagai alat analisis dan pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan. Menurut Putra et al., (2021) laporan keuangan berguna bagi investor untuk menentukan keputusan investasi terbaik dan paling menguntungkan. Pada dasarnya ketentuan pengungkapan wajib (*Mandatory disclosure*) ditetapkan untuk melindungi pengguna laporan keuangan dari informasi yang dapat merugikan pengguna laporan tersebut. Dalam melindungi kepentingan pemegang saham dalam suatu perusahaan, diperlukan peraturan tentang pengungkapan wajib (*Mandatory disclosure*). Tanpa diberlakukannya peraturan ini, perusahaan bisa saja menyembunyikan informasi yang paling penting yang seharusnya mereka ungkapkan.

Pengungkapan dikelompokkan menjadi pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan yang bersifat wajib meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Pengungkapan yang wajib dilaporkan perusahaan kepada publik menjadi dasar investor untuk mengambil keputusan investasi yang akan dilakukan (Syofyan et al., 2020). Tanpa peraturan mengenai pengungkapan wajib dalam laporan keuangan dapat memberikan kesempatan perusahaan untuk menyembunyikan informasi penting yang seharusnya diungkapkan sehingga diperlukan peraturan mengenai hal tersebut untuk melindungi kepentingan investor. Penerapan standar akuntansi berbasis IFRS belum dapat menjamin perusahaan akan melakukan pengungkapan lebih banyak daripada sebelumnya. Penelitian yang dilakukan Fauziah (2015) menyebutkan bahwa *Corporate Governance* mempengaruhi pengungkapan. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem institusional yaitu corporate governance untuk mengawasi kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Menurut Syofyan & Putra (2020) strategi deteksi tindakan dan langkah dalam pencegahan terjadinya kecurangan merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang baik.

Di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), selaku badan yang berwenang dalam penyusunan standar akuntansi telah melaksanakan program harmonisasi dan adaptasi standar akuntansi internasional dalam rangka pengembangan standar akuntansi dan mencanangkan bahwa standar akuntansi internasional (IFRS) akan mulai berlaku di Indonesia pada tahun 2012 secara keseluruhan. Selanjutnya pasca konvergensi dibutuhkan evaluasi kepatuhan perusahaan go public di Indonesia terhadap PSAK konvergensi IFRS untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kepatuhan perusahaan go public di Indonesia dalam menerapkan PSAK konvergensi IFRS pada laporan keuangan perusahaan. Beberapa tahun terakhir, pengungkapan dan transparansi dalam laporan keuangan menjadi isu penting di Indonesia. Adanya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di pasar modal menjadi bukti bahwa transparansi dan kepatuhan terhadap pengungkapan wajib masih kurang memadai (Fauziah,

2015). Setelah tanggal 1 Januari 2012 semua perusahaan *Go Publik* dan multinasional di Indonesia diwajibkan untuk menerapkan standar akuntansi yang konvergen dengan IFRS untuk penyusunan laporan keuangan (Akvila, 2015).

Sebagai tindak lanjut dari komitmen yang dibuat oleh kepala G-20 (*The Group Of Twenty*) dalam pertemuan puncak di London pada 2008, Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK-IAI) telah memulai program konvergensi Standar Akuntansi Keuangan menuju IFRS (*International Financial Reporting Standar*) yang dikeluarkan oleh IASB (*International Accounting Standard Board*). Jika dikaitkan dengan IFRS maka konvergensi dapat diartikan sebagai proses menyesuaikan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) terhadap IFRS. Dengan konvergensi IFRS tersebut, semua entitas bisnis di Indonesia, terkecuali entitas yang dikategorikan sebagai Entitas Tanpa Akuntan Publik (ETAP), wajib menerapkan PSAK yang sudah mengadopsi IFRS (Wahyudiyono, 2014). Penelitian terhadap pengungkapan laporan keuangan sebagai sarana akuntabilitas perusahaan kepada publik memang sangat menarik untuk dilakukan. Apalagi mengingat semakin diperlukannya keterbukaan informasi perusahaan kepada seluruh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut. Informasi mengenai perusahaan yang dibutuhkan oleh pengguna laporan bukan hanya harus transparan dan tepat waktu dalam penyajiannya, tetapi sebaiknya informasi tersebut dapat diungkapkan dengan lengkap guna memudahkan pengguna laporan dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan perusahaan yang bersangkutan (Sofyan et al., 2020). Penelitian ini dilatarbelakangi karena penelitian tentang tingkat kepatuhan *Mandatory disclosure* konvergensi IFRS masih memerlukan evaluasi lebih lanjut dan *Corporate governance* menjadi suatu hal yang penting untuk dilaksanakan mengingat seringnya terjadi konflik kepentingan antara pemegang saham atau komisaris dan para direktur dalam pengambilan keputusan. *Corporate governance* diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan serta konsisten dengan peraturan perundang-undangan (Fatin, 2017).

Standar IFRS itu sudah mulai di adopsi Indonesia 2008 hingga 2010, dilanjutkan tahun 2011 masa persiapan akhir IFRS, dan implementasi konvergensi IFRS dimulai tahun 2012. Oleh karena itu dengan merujuk Sutiyok & Rahmawati (2014) yang melakukan riset di perbankan, maka dikarenakan implementasi IFRS sejak 2015 tidak terbatas pada perbankan, sehingga di rasa perlu mengobservasi hal tersebut pada sektor manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Pentingnya penelitian untuk sektor manufaktur dikarenakan kompleksitas bisnis akuntansi pertanggungjawabannya yang berbeda dengan perbankan. Oleh karena itu penelitian ini dimaksudkan untuk membahas Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory disclosure* Konvergensi IFRS.

Dalam hal ini manajemen perusahaan dengan jumlah anggota dewan komisaris yang besar akan memudahkan untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan manajemen dan memantau kinerja *Chief Executif Officer* (CEO) sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan (Pitasari, 2014). Menurut Gunawan (2016) mengatakan, semakin besar jumlah dewan komisaris di dalam perusahaan maka pengawasan, pengevaluasian, dan pelaksanaan kebijakan oleh direksi semakin berkualitas sesuai dengan tujuan yang ingin di capai perusahaan sehingga

akan mempengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Penelitian yang dilakukan Pitasari (2014) menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris tidak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Akan tetapi penelitian yang dilakukan Gunawan (2016) menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub> : Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS

Publik dalam hal ini diartikan sebagai pihak eksternal perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan (Dewanti, 2017). Menurut Sutiyok (2014) dalam teori agensi, dinyatakan perusahaan dengan tingkat kepemilikan *dispersi* yang tinggi akan melakukan tingkat pengungkapan yang tinggi. Hal ini terjadi karena, pemilik saham *dispersi* meminta untuk pengungkapan secara transparan dengan tujuan agar pemilik saham dapat mengetahui perkembangan perusahaan setiap saat dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki saham terkonsentrasi. Penelitian yang dilakukan Sutiyok (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan *dispersi* tidak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Akan tetapi penelitian yang dilakukan Oktaviani (2016) menunjukkan bahwa kepemilikan *dispersi* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : Kepemilikan *dispersi* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS

Penelitian yang dilakukan Adriani (2015) dan Fatin (2017) menunjukkan bahwa jumlah rapat anggota dewan komisaris tidak berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Akan tetapi penelitian yang dilakukan Sutiyok (2015) menunjukkan bahwa jumlah rapat anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap *mandatory disclosure* konvergensi IFRS

Semakin besar komite audit di dalam perusahaan akan meningkatkan pengawasan terhadap auditor dan kinerja manajemen sehingga pelaporan keuangan semakin berkualitas serta akan mempengaruhi tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* perusahaan sesuai dengan konvergensi IFRS (Gunawan, 2016). Perusahaan Go publik di Indonesia diwajibkan memiliki komite audit yang bertugas untuk memberi pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal – hal yang perlu disampaikan oleh dewan direksi kepada dewan komisaris. Membangun peran komite audit yang efektif tidak dapat terlepas dari kacamata penerapan prinsip GCG secara keseluruhan di suatu perusahaan dimana independensi, transparansi dan disclosure, akuntabilitas dan tanggung jawab, serta sikap adil menjadi prinsip dalam landasan organisasi perusahaan (Pitasari 2014). Penelitian yang dilakukan Alvionita (2017) menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory*

*disclosure*. Akan tetapi penelitian yang dilakukan Akvila (2015) dan Pitasari (2014) menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>4</sub> : Jumlah komite audit berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data di Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui situs web [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh secara historis dari laporan tahunan yang disajikan di perusahaan manufaktur yang telah go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 - 2021. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan selama 3 bulan yaitu dari bulan Februari 2020 sampai bulan April 2020. Sampel dalam penelitian ini adalah Annual Report perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2020-2021. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau karakteristik-karakteristik tertentu (Sugiyono, 2012). Berikut ini kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel pada penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur yang *listing* di BEI periode 2020– 2021, perusahaan yang Menerbitkan *Annual Report* Periode 2020– 2021, perusahaan yang mengungkapkan jumlah anggota dewan komisaris, kepemilikan dispersi, jumlah rapat dewan komisaris, dan jumlah komite audit. Adapun rincian pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

**Tabel 1. Pemilihan sampel penelitian menggunakan *Purposive Sampling***

No	Uraian	Jumlah perusahaan
1	Perusahaan Manufaktur yang listing di BEI periode 2015-2016	286
2	Perusahaan yang tidak Menerbitkan <i>Annual Report</i>	(63)
3	Perusahaan yang tidak mengungkapkan jumlah anggota dewan komisaris, kepemilikan dispersi, jumlah rapat dewan komisaris, dan jumlah anggota komite audit	(148)
Jumlah Sampel dalam 1 periode		75
Total sampel perusahaan yang diteliti		150

Sumber : Data Olahan, 2021

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan *Mandatory disclosure* konvergensi IFRS. *Mandatory disclosure* adalah pengungkapan yang bersifat wajib yaitu pengungkapan informasi yang wajib dilakukan perusahaan yang didasarkan pada aturan dan standar tertentu. Identifikasi item pengungkapan menggunakan. Penelitian ini menggunakan item checklist BAPEPAM LK dengan NOMOR: KEP-347/BL/2012 sebanyak 73 Item. Item yang dipilih dari checklist ini disesuaikan dengan PSAK yang berlaku di Indonesia yang wajib diterapkan untuk perusahaan manufaktur yang sudah konvergensi IFRS (Sutiyok, 2014 : 158). Pengukuran variabel pengungkapan wajib (*Mandatory disclosure*) konvergensi IFRS

menggunakan teknik *scorsing*, yaitu jika item yang perlu diungkapkan dapat diterapkan (*applicable*) dalam perusahaan dan item tersebut diungkapkan oleh perusahaan diberi skor 1, jika item tersebut tidak diungkapkan diberi skor 0 (Pitasari, 2014 ) Rumus untuk menghitung tingkat kepatuhan *Mandatory disclosure* konvergensi IFRS adalah sebagai berikut :

MANDSCORE =

$$\frac{\text{Total Klasifikasi yang di ungkapkan}}{\text{Jumlah Item}}$$

Kepemilikan *dispersi* merupakan kepemilikan saham tersebar yang dimiliki oleh investor. Struktur kepemilikan dalam perusahaan dapat dikelompokkan menjadi struktur kepemilikan terkonsentrasi dan menyebar (*dispersi*). Kepemilikan *dispersi* dapat diwakili oleh presentase saham yang dimiliki pemegang saham yang kepemilikannya  $\leq 5\%$  (Sutiyok, 2014). kepemilikan perusahaan oleh publik adalah saham yang dimiliki oleh publik atau sejumlah saham yang dimiliki oleh masyarakat. Sehingga, semakin banyak saham yang dimiliki oleh publik maka semakin besar tuntutan publik terhadap pengungkapan lebih atas informasi yang disajikan perusahaan dalam laporan tahunan (Vernando, 2016). (Kepemilikan *dispersi* diukur dengan jumlah % kepemilikan saham oleh publik.

Rapat dewan komisaris dilakukan agar dewan komisaris dapat memantau kinerja manajemen secara berkelanjutan (Widjanarko, 2016). Tingkat pengungkapan wajib sangat dipengaruhi oleh jumlah rapat dewan komisaris. Jika jumlah rapat dewan komisaris setiap periodenya sedikit maka akan berdampak pada berkurangnya pengawasan dan pelaporan atas pengungkapan *Mandatory disclosure*. selain itu, dengan seringnya mengadakan pertemuan akan meningkatkan kepatuhan pengungkapan. jumlah rapat dewan komisaris dalam penelitian ini diukur dengan menjumlah seluruh rapat yang diselenggarakan selama satu periode (Sutiyok, 2014).

Pada perusahaan *go public* di indonesia diwajibkan memiliki komite audit yang bertugas untuk memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang perlu di sampaikan kepada dewan komisaris (Widjayanti, 2015). Komite audit adalah komite yang bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Komite audit memiliki peran dalam mengawasi pihak manajemen (*agen*) agar tidak melakukan tindakan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri sehingga dapat merugikan pemilik perusahaan (*prinsipal*). Komite audit juga dipandang sebagai alat untuk menghindari kecurangan dalam pelaporan keuangan dan memonitoring kinerja manajemen Ukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah anggota komite audit dalam perusahaan (Gunawan, 2016) komite audit ini mengacu pada (Azmi & Aprayuda, 2021).

Metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data dan menguji hipotesis yaitu dengan menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik (*normalitas*, *multikolinearitas*, *autokorelasi*, dan *heteroskedastisitas*). Selanjutnya dilakukan uji regresi linier berganda untuk menguji hipotesis yang diterima dan ditolak. Dan perangkat lunak SPSS (*Statistical Package for Social Sciences*) versi 20 yang digunakan untuk pengujian regresi.

Analisis regresi linear berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen (Priyatno, 2012:127). Model regresi yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara variabel yang berhubungan secara spesifik dan luas tingkat pengungkapan wajib dapat dirumuskan dengan persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$\text{MANDSCORE} = \beta_0 + \beta_1\text{JADK} - \beta_2\text{KD} + \beta_3\text{JRDK} + \beta_4\text{JKA} + e$$

Keterangan :

MANDSCORE = *Mandatory disclosure*

$\beta_0$  = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_4$  = Koefisien Regresi

JADK = Jumlah anggota dewan komisais

KD = Kepemilikan Dispersi

JRDK = Jumlah rapat dewan komisaris

JKA = Jumlah komite audit

e = Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi. Statistik deskriptif pada penelitian ini menyajikan jumlah data, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (*mean*) dan simpangan baku (*standar deviation*) dari variabel independen dan variabel dependen.

**Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
MANDSCORE	150	0,56	0,78	0,6485	0,06831
JADK	150	1,00	11,00	3,1267	1,65597
KD	150	0,01	3,00	0,1955	0,25937
JRDK	150	1,00	12,00	5,2533	1,66361
JKA	150	2,00	6,00	3,1133	0,53766

Sumber : Data Olahan, 2021

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah data dalam regresi berdistribusi normal atau tidak. Adapun uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*, dengan ketentuan jika nilai signifikansi *Kolmogrov Smirnov* pada variable lebih besar dari nilai signifikansi ( $\alpha = 0,05$ ) yang telah ditetapkan maka data terdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai signifikansi *Kolmogrov Smirnov* pada variable lebih kecil dari nilai signifikansi yang telah ditetapkan ( $\alpha = 0,05$ ) maka data tidak terdistribusi normal.

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas menggunakan *one sample kolmogorov smirnov***

		Unstandardized Residual
N		150
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,09821934
	Absolute	,098
Most Extreme Differences	Positive	,098
	Negative	-,072
Kolmogorov-Smirnov Z		1,199
Asymp. Sig. (2-tailed)		,113

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan tabel 3 nilai signifikan pada tabel one sample kolmogorov smirnof adalah 0,113 menunjukkan bahwa  $0,113 > 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual dari persamaan regresi berdistribusi normal. Uji multikolinearitas dalam penelitian dapat dilihat dari nilai *Tolerance* atau *Variance Inflation Factor* (VIF) (Fauziah, 2015).

**Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
JADK	0,919	1,088
KD	0,969	1,032
JRDK	0,959	1,042
JKA	0,913	1,096

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan Tabel 4 diatas menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10, Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi multikolinearitas. Model regresi yang baik biasanya tidak terjadi masalah autokorelasi. Adapaun cara yang dilakukan untuk membuktikan regresi terbebas dari autokorelasi yaitu dengan melihat nilai *Durbin Watson*, nilai DW yang diperoleh harus lebih besar dari DU dan lebih kecil dari 4-DU ( $DU < DW < 4-DU$ ).

**Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi**

Model	Durbin-Watson
1	2,022

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan nilai DW yang diperoleh adalah sebesar 2,022. Hasil tersebut lebih besar dari nilai DU, dimana berdasarkan tabel *Durbin Watson*  $N = 150$ ,  $K = 4$  dengan memperoleh nilai DU sebesar 1,774 dan lebih kecil dari nilai  $4 - DU$  yaitu sebesar 2,226 ( $4 - 1,774$ ). Hal tersebut menunjukkan bahwa  $DU < DW < 4 - DU$ , Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi autokorelasi. Uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikan antara variabel independen dengan absolut residual lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas (Priyatno, 2012).

**Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas menggunakan Uji Glejser**

Model	Unstandardized Coefficients			
	B	Std. Error	T	Sig
(Constant)	,017	,022	,767	,444
JADK	-,003	,002	-1,494	,137
KD	-,003	,012	-,274	,785
JRDK	,002	,002	1,144	,254
JKA	,011	,006	1,810	,072

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai sig  $> 0,05$ . Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model untuk menerangkan variasi variabel dependen. Semakin besar nilai koefisien determinasi suatu model, maka semakin besar kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

**Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,317 <sup>a</sup>	,100	,076	,06568

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan Tabel 7 diperoleh hasil koefisien determinasi regresi berganda (*Adjusted R<sup>2</sup>*) sebesar 0,076 atau 7,6% hal ini mengindikasikan bahwa *Mandatory disclosure* konvergensi IFRS mampu dijelaskan sebesar 7,6% oleh Jumlah Anggota Dewan Komisaris (JADK), Kepemilikan Dispersi (KD), Jumlah Rapat Dewan Komisaris (JRDK) dan Jumlah Komite Audit (JKA). Sedangkan sisanya yaitu sebesar 92,4% ( $100\% - 7,6\%$ ) dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian. Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kriteria pengujian secara parsial dengan tingkat *level of significant*  $\alpha = 0,05$  (Oktaviani, 2017).

**Tabel 8. Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Model	Unstdized Coefficients		Std. Coeff		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	,522	,039		13,465	,000
JADK	,002	,003	,041	,505	,615
KD	,043	,021	,163	2,032	,044
JRDK	,002	,003	,047	,588	,558
JKA	,033	,010	,259	3,138	,002

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 8 menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS dengan demikian hipotesis pertama ditolak. Tidak berpengaruhnya jumlah anggota dewan komisaris terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* dalam penelitian karena jumlah anggota dewan komisaris yang terlalu besar dalam perusahaan akan menyulitkan pada saat proses pengambilan keputusan. Hal ini juga disebabkan oleh setiap dewan komisaris memiliki pendapat dan pertimbangan tersendiri dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris maka tidak dapat mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi tentang kepatuhan *mandatory disclosure*. Penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan (Pitasari, 2014) bahwa jumlah anggota dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 8 menunjukkan bahwa kepemilikan dispersi memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS, dengan demikian hipotesis kedua diterima. Struktur kepemilikan dalam perusahaan dapat dikelompokkan menjadi struktur kepemilikan terkonsentrasi dan menyebar (*Dispersi*). Berdasarkan lampiran keputusan ketua BAPEPAM Nomor : KEP-431/BL/2012 kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten dan perusahaan publik, menyatakan bahwa uraian tentang nama pemegang saham dan persentase kepemilikannya yang salah satunya terdiri dari saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% saham emiten atau saham publik. Manajer perusahaan dengan kepemilikan menyebar (*Dispersi*) memiliki insentif untuk mengungkap informasi lebih lanjut untuk membantu pemegang saham untuk memantau perilaku mereka dan mengurangi biaya agens (Tasios, 2014). Kepemilikan dispersi diwakili oleh persentase saham yang dimiliki oleh investor individu luar manajemen selain pemerintah, institusi nasional dan asing, serta kalangan keluarga.

Adanya proporsi saham yang dimiliki publik atau masyarakat dapat mempengaruhi kelengkapan pengungkapan oleh perusahaan. Dimana perusahaan dengan mayoritas saham dimiliki oleh publik akan memberikan pengungkapan lebih luas dibandingkan dengan perusahaan yang sahamnya tidak dimiliki publik (Widjayanti, 2017). Perusahaan yang

mempunyai struktur kepemilikan menyebar (*Dispersi*) akan cenderung menyediakan pengungkapan informasi secara luas (Sutiyok, 2015). Hal ini terjadi karena, pemilik saham dispersi meminta untuk pengungkapan secara transparan dengan tujuan agar pemilik saham dapat mengetahui perkembangan perusahaan setiap saat. Sehingga dapat dinyatakan bahwa semakin besarnya kepemilikan dispersi dalam suatu perusahaan maka akan semakin banyak informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dan akan meningkatkan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* Konvergensi IFRS. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widjanarko, 2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan dispersi memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 8 menunjukkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS dengan demikian hipotesis ketiga ditolak. Kinerja yang dilakukan oleh dewan komisaris akan dapat dilihat efektifitasnya melalui kehadiran anggota dewan komisaris dalam rapat yang secara rutin diadakan. Apabila dalam rapat terdapat komisaris yang mendominasi jalannya rapat dan hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya dengan tidak memperhatikan pendapat komisaris yang lain maka proses pengambilan keputusan dalam rapat juga tidak efektif, maka rapat yang dilakukan dewan komisaris tidak dapat membahas permasalahan secara detail yang berkaitan dengan pengungkapan informasi yang wajib diungkapkan secara luas oleh perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar jumlah rapat dewan komisaris maka akan semakin sulit untuk melakukan kepatuhan *mandatory disclosure*. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Adriani, 2015) yang menyatakan bahwa jumlah rapat dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 8 menunjukkan bahwa jumlah komite audit memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS dengan demikian hipotesis keempat diterima. Salah satu peran terpenting dari komite audit adalah pengawasannya terhadap pelaksanaan kontrol internal. Bagi perusahaan, hal tersebut sangat diharapkan untuk meningkatkan kepatuhan dalam pencatatan untuk dan melindungi kepentingan pemegang saham serta meningkatkan modal ekuitas. Perusahaan *go public* di Indonesia diwajibkan memiliki komite audit yang bertugas untuk memberi pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang perlu disampaikan oleh dewan direksi kepada dewan komisaris. Membangun peran komite audit yang efektif tidak dapat terlepas dari kacamata penerapan prinsip GCG secara keseluruhan di suatu perusahaan dimana independensi, transparansi dan *disclosure*, akuntabilitas dan tanggung jawab, serta sikap adil. Dalam praktik *corporate governance*, teori agensi mensyaratkan untuk melakukan pengungkapan laporan keuangan untuk menghindari konflik diantara pihak yang berkepentingan (Alvionita, 2015). Dalam hal ini komite audit mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah mengungkapkan informasi sesuai dengan persyaratan yang diwajibkan. Alasan mendasar atas hal ini dapat disebabkan karena jumlah anggota komite audit perusahaan sampel rata-rata telah memenuhi ketentuan minimal yaitu

tiga orang dan telah mampu untuk memberikan pendapat profesional yang memerlukan perhatian dari dewan komisaris.

Dalam hal ini komite audit mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah mengungkapkan informasi sesuai dengan persyaratan yang diwajibkan (Pitasari, 2014). Jumlah komite audit juga dapat meningkatkan kepatuhan *mandatory disclosure* karena dengan jumlah komite audit yang banyak, pengawasan yang dilakukan oleh komite audit akan semakin ketat dan akhirnya akan dapat meningkatkan kepatuhan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) perusahaan. Dengan adanya komite audit berperan sebagai pengawas maka dapat dinyatakan bahwa semakin besarnya jumlah anggota komite audit di dalam perusahaan maka dapat meningkatkan pengawasan terhadap auditor dan kinerja manajemen sehingga tidak terjadi kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan dan laporan keuangan yang dihasilkan semakin berkualitas serta akan lebih cenderung patuh dalam meningkatkan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Penelitian ini sesuai dengan peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh (Pitasari, 2014) yang menyatakan bahwa jumlah anggota komite audit memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Hasil penelitian ini menunjukkan hipotesis yang kelima yaitu F Hitung pada model tersebut sebesar 4,049 dengan signifikansi sebesar 0,004. Nilai signifikansi tersebut menunjukkan kurang dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa semua variabel independen yang terdiri dari jumlah anggota dewan komisaris, kepemilikan *dispersi*, jumlah rapat dewan komisaris, dan jumlah komite audit secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS, sehingga hipotesis kelima diterima. Dengan demikian dapat dikatakan jumlah komite audit dan kepemilikan *dispersi* secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Hasil dari regresi linear berganda variabel jumlah komite audit dan Kepemilikan *dispersi* memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Sedangkan, jumlah anggota dewan komisaris dan jumlah rapat dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

## SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2021. Berdasarkan metode purposive sampling diperoleh 150 data sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2016. Penelitian ini menggunakan item *checklist* BAPEPAM LK dengan NOMOR: KEP-347/BL/2012 sebanyak 73 Item. Berdasarkan analisis dan pengujian data dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan yaitu Jumlah anggota dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Kepemilikan *dispersi* memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Jumlah rapat dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap

tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Jumlah komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Jumlah anggota dewan komisaris, kepemilikan dispersi, jumlah rapat dewan komisaris dan jumlah komite audit secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Keterbatasan penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan variabel yang diteliti meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan yang terbatas pada 4 variabel sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi secara luas untuk seluruh perusahaan publik lain. Peneliti selanjutnya perlu memperluas dalam menentukan objek penelitian, dapat menggunakan objek perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, maupun perusahaan jasa serta menambah tahun pengamatan dalam penelitian dengan tujuan penelitian selanjutnya dapat tergeneralisasi secara luas. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel yang lebih luas, dengan menambah beberapa proksi dari mekanisme *corporate governance* seperti komite-komite yang ada di dalam perusahaan seperti proporsi komisaris independen, kepemilikan manajerial dan lainnya. Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan daftar Checklist item lain selain *cheeklist* BAPEPAM LK untuk mengukur *mandatory disclosure* pada perusahaan yang akan diteliti.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, A. Hafiz, M. R dan Chairina. 2015. Pengaruh struktur corporate governance terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif. *Symposium Nasional Akuntansi XVII*, 1-25
- Aprayuda, R., Misra, F., & Kartika, R. (2021). Does the order of information affect investors' investment decisions? Experimental investigation. *Journal of Accounting and Investment*, 22(1), 150-172.
- Aprayuda, R., & Misra, F. (2020). Faktor yang mempengaruhi keinginan investasi investor muda di pasar modal Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(5), 1084-1098.
- Azmi, Z., & Aprayuda, R. (2021). Apakah Kompensasi Eksekutif Bank dapat Mempengaruhi Manajemen Laba?. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 5(2), 193-211.
- Akliva, P. 2015. Pengaruh struktur corporate governance terhadap mandatory and voluntary disclosure setelah konvergensi IFRS. *Jurnal Akuntansi dan Keunagan*.
- Alvionita, I dan Taqwa, S. 2015. Pengaruh struktur kepemilikan dan mekanisme corporate governance terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. *Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (SNEMA) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*, 590-601.
- Aminati, D. 2014. Pengaruh profesional auditor terhadap kualitas kinerja auditor internal. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 3(3)

- Andypratama, L. M dan Mustamu, R. H. 2013. Penerapan prinsip-prinsip good corporate governance pada perusahaan keluarga. *Jurnal Mahasiswa Manajemen Bisnis (AGORA)*, Vol. 1.No. 1
- Aryati, T. 2015. Konvergensi ifrs dan perilaku manajemen laba di indonesia, malaysia dan singapura. *Media Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 30. No. 2
- Dewanti, F. O. 2017. Pengaruh ownership dispersion, financial distress dan firm size terhadap luas pengungkapan sukarela. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 5. No. 2.
- Fatin, N. N. 2017. Pengaruh struktur corporate governance terhadap pengungkapan wajib konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif. *Buletin Ekonomi* Vol. 15. No. 1, hal 1-154.
- Fauziah, I. 2015. Pengaruh mekanisme corporate governance terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure pasca konvergensi ifrs. *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol. 1. No. 2
- Gunawan, B dan Hendrawati, E.R. 2016. Peran Struktur corporate governance dalam tingkat kepatuhan pengungkapan wajib periode setelah konvergensi. IFRS. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia* Vol. 1. No. 1, hal 71-83
- Ika, S. R. 2017. Kepatuhan perusahaan publik terhadap pengungkapan wajib (mandatory disclosure) dan faktor-faktor corporate governance yang mempengaruhinya. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 7. No. 1, hal 58-75
- Luthfi, M. 2013. Tanggung jawab sosial perusahaan dan kinerja perusahaan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen* Vol. 2, No. 2, hal 123
- Nisfiannoor, M. 2009. *Pendekatan Statistika Modern Untuk Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Oktaviani, I. 2017. Faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan corporate governance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* Vol .6. No. 7
- Pitasari, A dan Septiani, A. 2014. Analisis pengaruh struktur corporate governance terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi ifrs pada laporan laba rugi komprehensif. *Diponegoro Journal Of Accounting* Vol. 3. No. 2, hal, 1
- Priyatno, D. 2012. *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20*. Yogyakarta: Andi
- Putra, D. G., & Rahayu, R. (2020). Peranan implementasi tata kelola teknologi informasi (IT governance) sebagai faktor penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan. *Jurnal Inovasi Pendidikan Ekonomi (JIPE)*, 10(1), 01-07.
- Putra, D. G., Rahayu, R., & Putri, A. (2021). The influence of Enterprise Resource Planning (ERP) implementation system on company performance mediated by organizational capabilities. *Journal of Accounting and Investment*, 22(2), 221-241.
- Putri, R. A. D., Rahmawati, E dan Sofyani, H. 2018. Asimetri informasi dan mandatory disclosure Konvergensi international financial reporting Standard: efek terhadap relevansi nilai Informasi laba dan nilai buku. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, Vol. 18. No. 1, hal 1-18
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisiis(pendekatan kuantitatif,kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

- Sutiyok dan Rahmawati, E. 2014. Pengaruh mekanisme corporate governance terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS di perbankan. *Jurnal Akuntansi dan Investasi* Vol. 15. No. 2, hal 151-162
- Suwardjono. 2014. *Teori Akuntansi Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Yogyakarta: BPFE
- Sofyan, R., Putra, D. G., & Aprayuda, R. (2020, November). Does the Information on the Internet Media Respond to the Stock Market?. In The Fifth Padang International Conference On Economics Education, Economics, Business and Management, Accounting and Entrepreneurship (PICEEBA-5 2020) (pp. 510-520). Atlantis Press.
- Syofyan, R., & Putra, D. G. (2020, March). The role of Good Corporate Governance (GCG) implementation in Indonesian company. In 4th Padang International Conference on Education, Economics, Business and Accounting (PICEEBA-2 2019) (pp. 819-825). Atlantis Press.
- Syofyan, R., Putra, D. G., & Aprayuda, R. (2020). Influence Of Company Value Information, Dividend Policy, And Capital Structure On Stock Price. SAR (Soedirman Accounting Review): Journal of Accounting and Business, 5(2), 152-169.
- Tasios, S dan Bekiaris, M. 2014. *Mandatory disclosures* and firm characteristics: evidence from the Athens Stock Exchange. *International journal Managerial and Financial Accounting*, Vol. 6. No. 4, hal 303-321
- Vernando, R. Y. 2016. Pengaruh *ownership dispersion*, financial distressed dan umur *listing* terhadap luas pengungkapan sukarela. *Wahana Riset Akuntansi*, Vol. 4. No. 1
- Wahyudiono, B. 2014. *Laporan Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Widjanarko, D. 2016. Analisis mekanisme corporate governance dalam tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS serta dampaknya terhadap return saham. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 2. No. 2
- Widjayanti, S. A. 2015. Pengaruh struktur dan mekanisme corporate governance pada tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 4. No. 7
- Yudhiarti, R., Mahfud, M. K. 2016. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Struktur modal. *Diponegoro Journal Of Management*, Vol. 5. No. 3, hal 1-13